

Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Barat Indonesia

Nurul Fitri ¹ dan Sasqia Putri ²

^{1,2} Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-
raniry, Banda Aceh

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan barat Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel 10 provinsi selama periode 2008-2015. Peralatan ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan fungsional variabel tersebut terdiri dari regresi panel metode fixed effect, dan Granger causality test. Penelitian menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan. Hasil Granger causality test mengindikasikan adanya kausalitas satu arah dari belanja pegawai dan belanja modal ke pertumbuhan ekonomi dan dari belanja pegawai ke belanja modal.

Kata kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Regresi Panel dan Granger Causality Test.*

Abstract. This study aims to analyze the effect of capital expenditure and personnel expenditure on regional economic growth in western Indonesia. The data used is a panel data of 10 provinces during the period 2008-2015. The econometric models used to analyze the functional relationship of these variables consisted of the fixed effect method of panel regression, and the Granger causality test. The study found that capital expenditure has a positive but not significant effect on regional economic growth. Conversely, personnel expenditure has a positive and significant effect. Granger causality test results indicate a one-way causality from personnel expenditure and capital expenditure to economic growth and from personnel expenditure to capital expenditure.

Keywords: *Economic Growth, Capital Expenditure, Personnel Expenditure, Panel Regression and Granger causality test.*

*Corresponding author. Email: nurulfitri@ar-raniry.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v3i1.94>

Received: 21 April 2019, Revision: 10 Juni 2019, Accepted: 25 Juni 2019

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2019. Published by Divisi Riset, Lembaga KITA.

Pendahuluan

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lahirnya otonomi daerah diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari adanya pembangunan ekonomi disuatu daerah (Amri, 2018; Amri et al., 2019). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diindikasikan oleh adanya kenaikan output barang dan jasa dalam perekonomian daerah tersebut yang kemudian dapat diukur dengan pendapatan per kapita masyarakatnya (Amri & Nazamuddin, 2018).

Sumatera sebagai kawasan barat Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Provinsi yang berada di kawasan ini memberikan kontribusi terbesar kedua bagi pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional setelah Jawa. Pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut tentunya ikut memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Pada tahun 2009 BPS mencatat pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 4,72 persen dan meningkat menjadi 5,70 persen pada tahun 2013. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera sebagai daerah kawasan Barat Indonesia.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui kebijakan anggaran di antaranya dalam bentuk belanja modal dan belanja pegawai. Belanja modal biasanya dalam bentuk pembelian barang-barang modal yang berguna untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat (Amri, 2017). Anggaran pemerintah untuk menyediakan barang publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk kelompok belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 yang menyatakan bahwa belanja

modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal juga diwujudkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Mulyanto, 2007). Selanjutnya belanja pegawai dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, tunjangan, perjalanan dinas dan lain sebagainya. BPS (2018) membagi belanja pegawai dalam dua kelompok yakni belanja pegawai tidak langsung dan belanja pegawai langsung.

Selama periode tahun 2011-2005 alokasi anggaran belanja daerah di kawasan barat Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah provinsi. Di sisi lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi daerah secara rata-rata juga meningkat. Namun demikian, terdapat perbedaan pertumbuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Sehingga menarik untuk mengkaji apakah pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait dengan belanja modal dan belanja pegawai daerah yang bersangkutan.

Kajian mengenai keterkaitan antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun hasil kajian mereka masih menunjukkan hasil yang beragam. Tidak semua belanja pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya temuan penelitian Nurudeen & Usman (2010) yang menyimpulkan bahwa tidak semua belanja pemerintah dapat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dan belanja lancar (*current expenditure*) serta belanja pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya peningkatan belanja pemerintah dalam bidang transportasi, komunikasi dan kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Desmon et al. (2012) menemukan bahwa belanja modal dan recurrent expenditure

pada layanan ekonomi memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja modal dan recurrent expenditure pada layanan sosial dan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut memberikan informasi yang relatif berbeda mengenai arah pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penelitian ini menguji kembali hubungan fungsional antara pertumbuhan ekonomi dengan dua kelompok belanja pemerintah daerah (belanja modal dan belanja pegawai). Selain itu, fokus kajian dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan arah pengaruh kedua jenis belanja tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menganalisis arah kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dengan dua jenis belanja tersebut secara bersamaan.

Literature Review

Keterkaitan Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi

Anggaran belanja daerah merefleksikan pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan anggaran merupakan manifestasi dari intervensi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan fiskal daerah yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran kebijakan fiskal dalam proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang menjadi krusial dalam ekonomi makro sejak munculnya model pertumbuhan endogen (Paparas, 2015). Hubungan antara kebijakan fiskal pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sudah sering lama menjadi kajian, namun masih memberikan kesimpulan yang beragam (Peltzman, 2016).

Romero-Avila dan Strauch (2008) menemukan bahwa sisi pengeluaran pada anggaran mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengeluaran dalam bentuk investasi publik mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks daerah, belanja modal pemerintah daerah selain diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik (Zulfan & Maulana 2019), namun juga dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi di daerah (Muliadi & Amri, 2019). Penelitian Kuncoro (2002) menemukan bahwa alokasi belanja modal pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana publik berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda Kuncoro, hasil penelitian Modebe et al (2012) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keterkaitan Belanja Pegawai Dengan Pertumbuhan Ekonomi

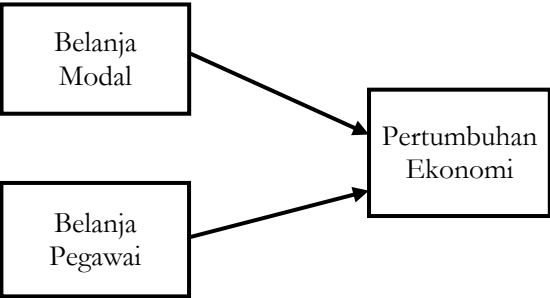
Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. PNS, dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS. Fungsi dari belanja pegawai adalah untuk menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pemerintah daerah (Burhanuddin, 2012).

Menurut Burhanuddin (2012) besarnya jumlah dana pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar pula. Hal ini tak sebanding dengan pendapatan asli yang masih kurang memadai dalam menutup pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran belanja diindikasikan menyerap dana transfer dari pemerintah pusat yang lebih, maka belanja pegawai di perkirakan menjadi salah satu penyebab terjadinya *flypaper effect* pada pemerintah daerah.

Secara teoritis terdapat hubungan antara belanja pegawai dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pegawai terutama dalam gaji dan tunjangan misalnya, berdampak pada konsumsi masyarakat. Sedangkan konsumsi merupakan salah satu komponen pembentuk nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari dukungan belanja konsumsi masyarakat.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan belanja pemerintah dalam bentuk belanja modal dan belanja pegawai dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Hubungan

fungsi antara pertumbuhan ekonomi dengan dua variabel tersebut tidak hanya didukung oleh sejumlah teori, tetapi juga telah dibuktikan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Karena itu, paradigma penelitian atau hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metodologi Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dengan belanja modal dan belanja pegawai sebagai variabel independen. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk *time series* data selama periode 2008-2015 dari 10 provinsi di Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan provinsi Kepulauan Riau. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya.

Pertumbuhan ekonomi diproksi dari pendapatan per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2000 di hitung dengan satuan ribu rupiah per kapita. Penggunaan pendapatan per kapita sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi didasarkan sejumlah penelitian sebelumnya (Amri, 2014). Selanjutnya belanja modal dan belanja pegawai juga diproksi dari belanja modal dan belanja pegawai per kapita dihitung dengan satuan ribu rupiah per kapita. Selanjutnya model analisis data yang digunakan adalah regresi panel metode *fixed effect*.

Hasil dan Pembahasan

Belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan barat Indonesia. Hal ini ditunjukkan

oleh koefisien estimasi masing-masing variabel seperti dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Panel

| Variable | Coef | Std. Error | t-Stat | p-value |
|----------|-------|------------|--------|---------|
| C | 4.313 | 0.344 | 12.54 | 0.000 |
| LBM | 0.024 | 0.017 | 1.407 | 0.164 |
| LBP | 0.379 | 0.028 | 13.38 | 0.000 |

Effects Specification

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Cross-section fixed (dummy variables) | |
| R ² | 0.989 |
| Adj R ² | 0.987 |
| F-stat | 552.532 |
| Prob(F-stat) | 0.000 |

Sumber : Data Sekunder (diolah) 2019

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka persamaan regresi panel yang menjelaskan hubungan fungsional antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal dan belanja pegawai dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$LPDRB_{it} = 4,313 + 0,024LBM_{it} + 0,369LBP_{it}$$

Peningkatan belanja pemerintah dalam bentuk belanja modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien estimasi sebesar 0,024, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat peningkatan belanja modal tidak signifikan dengan *p-value* sebesar 0,164. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal pemerintah belum terfokus pada upaya peningkatan produksi barang jasa dalam perekonomian daerah. Kendatipun belanja modal meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut belum secara nyata berdampak pada kegiatan ekonomi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu cepat. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Modebe et al. (2012) di Nigeria yang juga mengungkapkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya penelitian ini bertolak belakang dengan temuan penelitian Ramli & Andriani (2013) dan hasil kajian Amri & Aimon (2017) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan barat Indonesia, dengan nilai koefisien estimasi sebesar 0,379 dan *p-value* sebesar 0,000. Terjadinya peningkatan belanja pegawai secara nyata dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengaruh belanja pegawai terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan belanja tersebut secara langsung dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Apalagi belanja pegawai dalam bentuk gaji, perjalanan dinas, honorarium dan belanja lainnya dapat mendorong pengeluaran konsumsi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Matthew & Udom (2015) yang juga menemukan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, kajian Bose et al. (2007) juga menyimpulkan adanya hubungan positif antara belanja publik dengan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pegawai mendorong konsumsi dan pada gilirannya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Guna menguji arah kausalitas antar variabel kami menggunakan *Granger causality test*. Model peralatan ekonometrik ini dapat mendeteksi apakah kausalitas yang terjadi antara suatu variabel dengan variabel lainnya bersifat satu arah (*unidirectional*), dua arah (*bidirectional*) atau tidak ada kausalitas sama sekali. Hasil uji kausalitas tersebut seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Hasil Granger Causality Test

| | F-Stat | p-value |
|--------------------------------|--------|----------------|
| LBP does not Granger Cause LPE | 4.475 | 0.016** |
| LPE does not Granger Cause LBP | 0.678 | 0.512 |
| LBM does not Granger Cause LPE | 2.929 | 0.062* |
| LPE does not Granger Cause LBM | 0.468 | 0.629 |
| LBM does not Granger Cause LBP | 0.236 | 0.791 |
| LBP does not Granger Cause LBM | 2.926 | 0.062* |

Sumber: Data Primer (Diolah), 2019

*) signifikan pada keyakinan 95%.

**) signifikan pada keyakinan 90%.

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan 95% terjadi kausalitas satu

arah (*unidirectional causality*) dari belanja pegawai ke pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadinya perubahan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan respon terhadap perubahan alokasi anggaran pemerintah dalam belanja pegawai. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar peningkatan belanja modal semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya pada tingkat keyakinan 90%, kausalitas satu arah juga terjadi dari belanja modal ke pertumbuhan ekonomi dan dari belanja pegawai ke belanja modal. Belanja modal dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya pada keyakinan 90%. Hal ini konsisten dengan pengaruh koefisien estimasi variabel tersebut seperti ditunjukkan dalam tabel 1 sebelumnya, tidak signifikan pada keyakinan 95%. Artinya, kenaikan dalam belanja modal tidak secara nyata dapat berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Adanya kausalitas satu arah dari belanja pegawai ke belanja modal mengindikasikan bahwa perubahan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang-barang modal merupakan respon terhadap perubahan alokasi anggaran belanja pegawai. Secara implisit, bukti statistik ini mengindikasikan bahwa dalam proses penyusunan anggaran daerah, penentuan besaran anggaran daerah dalam belanja modal menjadikan belanja pegawai sebagai pertimbangan penting. Bukti empiris ini secara tidak langsung memperkuat sinyalemen adanya perilaku opportunistik dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kesimpulan dan Saran

Belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ekonomi daerah di Sumatera. Kendatipun belanja modal meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut tidak berdampak secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera. Peningkatan belanja pegawai secara nyata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penurunan belanja pegawai

juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Hasil *Granger causality test* menunjukkan bahwa terjadi kausalitas satu arah (*unidirectional causality*) dari belanja pegawai dan belanja modal ke pertumbuhan ekonomi, dan dari belanja pegawai ke belanja modal.

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka pemerintah daerah di Sumatera sebaiknya merancang kembali kebijakan pengalokasian belanja modal sebagai bagian penting dari instrumen kebijakan fiskal daerah. Selama ini, pengalokasian belanja modal belum secara nyata dapat meningkatkan produksi barang dan jasa dalam perekonomian daerah. Padahal belanja modal seharusnya memiliki dampak jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, pengalokasian anggaran pemerintah dalam bentuk belanja pegawai hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari segi konsumsi. Padahal syarat utama pertumbuhan jangka panjang adalah meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu yang didorong oleh peningkatan output produksi

Daftar Pustaka

- Amri, K. (2014). Infrastruktur transportasi dan kepadatan penduduk dampaknya terhadap pendapatan per kapita: *Panel Data Evidence* dari sembilan provinsi di Sumatera, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 438-450.
- Amri, K. (2017). Indek harga konsumen dan belanja modal terhadap indek perilaku korupsi, *SI-MEN (Akuntansi dan Manajemen)*, 8(1), 49-65.
- Amri, K. (2018). The macroeconomic impact of regional minimum wages: A cross-province data evidence from Indonesia, *Regional Science Inquiry*, 10(3), 163-176.
- Amri, K., & Aimon, H. (2017). Pengaruh Pembentukan Modal dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, *Economac* 1(1), 1-16.
- Amri, K., & Nazamuddin. (2018). Is there a causality relationship between economic growth and income inequality? Panel data evidence from Indonesia, *Eurasian Journal of Economics and Finance*, 6(2), 8-20.
- Amri, K., Nazamuddin., Masbar, R., & Aimon, H. (2019). Is there a causality relationship between local tax revenue and regional economic growth? A panel data evidence from Indonesia, *Regional Science Inquiry*, 11(1), 73-84.
- Bose, N., Hague, M.E. and Osborn, D.R. (2007). Public Expenditure and Economic Growth; A Disaggregated Analysis for Developing Countries. The Machester School, 75-85, 533-556. Boston: McGraw Hill Inc.
- BPS (2018) Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2014-2017, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Burhanuddin, A. (2012). Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Pemerintah, dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect. *Jurnal Analisis Akuntansi*, 1(1), 2-10.
- Desmon, N. I., Titus, O. A., Timothy, O. C., & Odich, N. L. (2012). Effects of public expenditure on economic growth in Nigeria: a disaggregated time series analysis, *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 1(7), 2-16.
- Kuncoro, M. (2002). Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Airlangga. Jakarta.
- Matthew, O., & Udom, E. (2015). Estimating the impact of the components of public expenditure on economic growth in Nigeria (a bound testing approach), *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(3), 1-8.

- Modebe, N.J., Okafor, R. G., Onwumere, J. U. J., & Ibe, I. G. (2012). Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth, *European Journal of Business and Management*, 4(19), 66-74.
- Muliadi., & Amri, K. (2019). Infrastruktur Jalan, Belanja Modal dan Kesempatan Kerja: Bukti Data Panel Kabupaten Kota di Aceh, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 334-341.
- Mulyanto. 2007. Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi. *Region*, 2(1), 43-52.
- Nurudeen, A., & Usman, A. (2010). Government Expenditure And Economic Growth In Nigeria, 1970-2008: A Disaggregated Analysis, *Business and Economics Journal*, 4, 1-11.
- Paparas, D., Richter, C., & Paparas, A. (2015). Fiscal Policy and Economic Growth, Empirical Evidence in European Union, *Turkish Economic Review*, 2(4), 239-268.
- Peltzman, S. (2016). State and local fiscal policy and growth at the border, *Journal of Urban Economics*, 95, 1–15.
- Ramli, A., & Andriani, A. A. (2013). The Effects of Consumption, Private Investment, and Government Expenditures on Economic Growth in South Sulawesi, Indonesia, *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(14), 145-154.
- Romero-Ávila, D., & Strauch, R. (2008). Public finances and long-term growth in Europe: Evidence from a panel data analysis, *European Journal of Political Economy*, 24(1), 172-191.
- Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Zulfan, T., & Maulana, H. (2019). Gejala fly paper effect di provinsi Aceh ditinjau dari dana alokasi umum dan dana otonomi khusus, *INOVASI*, 15 (2), 188-197
- Ayuniyyah, Q. A. H. (2018). Zakat For Poverty Alleviation and Income Inequity Reduction: west Java Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85-100.
- Badan Pusat Statistik, (2018). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh .
- Banda Pusat Statistik, (2018). Aceh Dalam Angka.
- Bashir, A. H. (2018). Reducing Poverty and Income Inequities: Current Approaches and Islamic Perspective. *Journal King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 31(1), 23-41.
- Beik, I. &. (2015). Contruction Of CIBEST Model As Measurement Of Poverty And Welfare Indices From Islamic Persfective. *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, 87-104.
- Darise, N. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Frans, D. S. R. (2017). The Influence of local Government Revenue, Per capita income, Education Level on Level Poverty (Empiric Study On City In West Java During. e-Proceeding of Management, 4(2), 23-35.
- Green, W. (2012). *Econometric Analysis*. Seventh Edition. New York: Pearson Education, Inc.
- Gujarati, D. (2006). *Ekonometrika*, Jakarta (ID): Erlangga.
- Jaka, S. (2018). Reducing Regional Poverty Rate in Central Java. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(1), 121-135.

- Maharajabdinul, R. A. (2015). Contribution Of Fiscal Decentralization To Poverty Reduction In Eastern Indonesia. *Journal of Business and Management*, 17(12), 53-60.
- Maryati, U. D. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 21-37.
- Miranti, R. E., Vidyattama, H. C., & Duncan, 2013 (2013). Trend in Poverty and Inequality in Decentralising Indonesia In OECD Social, Employment and Migration Working Papers. OECD Publishing, 1-115.
- Muliadi., & Amri, K. (2019). Infrastruktur Jalan, Belanja Modal dan Kesempatan Kerja: Bukti Data Panel Kabupaten Kota di Aceh, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 334-341.
- Nursini, A. S. (2018). Implementing Pro Poor Budgeting in Poverty Reduction: A Cases of Lokal Government in Bone District, South Sulawesi Province, Indonesia. *International Journl of Economics and Financeal Issues* 8(1), 30-38.
- Panji, I. P. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskina di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud* 5(3), 316-337.
- Saraswati, S. A., & Prami, I. G. A. A. (2016). Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud* 5(4), 1292-1316.
- Sejahtera, P. (2016). Decentralization and Poverty in Indonesia: The Cast of karo District. *Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 8-15.
- UU, R. I. Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- World Bank, (2010). Building Institutions for Market. *World Development Report 2010 (Overview)*.